

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab terdahulu dan setelah melakukan uji empiris mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap outcome pelayanan publik bidang pendidikan periode 2010-2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Desentralisasi fiskal yang diwakili oleh belanja daerah bidang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni SMA/SMK di kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan koefisien 0.0450.
- b. PDRB Perkapita berpengaruh signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni SMK/SMA kabupaten/kota di Propinsi Sumatera Selatan dengan koefisien 0.8919.
- c. Rasio murid guru tidak signifikan terhadap Angka Partisipasi Murni SMA/SMK di Propinsi Sumatera Selatan.

#### **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat di ajukan beberapa saran, sebagai berikut:

##### **6.2.1 Untuk Pemerintah Daerah**

Adapun saran untuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah dapat lebih baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat daerahnya terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik khususnya bidang pendidikan. Seperti Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas , serta memberikan prioritas pada faktor-faktor input pendidikan yang dapat

memacu pencapaian Angka Partisipasi Murni yang optimal dan tercapainya pemerataan pendidikan di Sumatera Selatan.

2. Pemerintah daerah dapat menggali potensi sumber daya daerah semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan belanja pendidikan untuk kemajuan masyarakat di daerahnya.
3. Kebijakan penambahan jumlah guru terutama ke daerah yang Angka Partisipasi Murninya masih rendah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.
4. Penyediaan armada transportasi yang memadai terutama di daerah-daerah yang masih minim sarana transportasi umum.

#### **6.2.2 Untuk masyarakat**

Diharapkan masyarakat lebih aktif berperan serta dalam usaha pembangunan di daerahnya dan aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

